

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada seputaran tahun 1700-an, kata demokrasi telah dikenal sekian lama oleh para kalangan teoritis politik dan secara umum dipahami oleh para pendidik sebagai salah satu dari tiga sistem politik Aristoteles (selain sistem aristokrasi dan monarki).¹ Istilah ini muncul dalam abstraksi dan diskusi mengenai sistem politik yang ideal.

Pada perjalanannya, gelombang demokrasi tidak berjalan mulus dan mengalami pasang surut. Pasca Perang Dunia II, tantangan gelombang anti demokrasi muncul dari negara-negara Blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet bersama dengan negara-negara satelitnya.

Namun, gelombang demokrasi dan demokratisasi telah berubah menjadi “virus” yang cepat menyebar, terutama pada dekade 80-90an. Demokratisasi tersebut melanda berbagai belahan dunia, terutama sekali menerpa tatanan masyarakat negara-negara berkembang dan negara-negara yang otoriter. Uni Soviet sebagai negara kampiun komunis pun tidak terlepas dari pengaruh tersebut dan mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Setelah lepas dari Uni Soviet, negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut berupaya menerapkan konsep demokrasi dalam sistem politik mereka.

¹ John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*.

Walaupun dalam kenyataannya negara-negara tersebut malah terjebak dalam pemerintahan yang otoriter, seperti halnya yang terjadi di Ukraina, Kirgistan, Georgia, dan Uzbekistan. Namun lambat laun rakyat bersama kaum oposisi berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang otoriter tersebut. Revolusi yang terjadi di Ukraina, Georgia dan Kirgistan telah berhasil menggulingkan rezim otoriter dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih demokratis.

Tapi hal ini tidak berlaku bagi Uzbekistan yang berada dibawah rezim Islam Karimov. Tragedi Andijan yang berawal dari demonstrasi masyarakat sebagai bentuk kemarahan terhadap pemerintah yang dinilai otoriter dan korup harus berakhir dengan peristiwa pembantaian masal oleh pihak militer Uzbekistan. Tragedi tersebut telah meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat Uzbekistan sekaligus mematahkan perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter Islam Karimov.

Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan perlawanan rakyat Uzbekistan dalam menggulingkan rezim Islam Karimov. Dalam hal ini penulis menilai bahwa kegagalan tersebut juga merupakan suatu kegagalan dalam demokratisasi di Uzbekistan, karena rakyat tidak bisa menggulingkan rezim yang otoriter untuk digantikan rezim yang lebih demokratis.

Tulisan yang mengangkat judul **“Kegagalan Demokratisasi di Uzbekistan”** ini merupakan sumbangan penulis untuk menambah wawasan kita mengenai demokrasi dan demokratisasi terutama yang terjadi di negara-negara bagian Uni Soviet. Di samping itu hal ini juga diharapkan

sepanjang pengetahuan penulis bahwa belum ada penulis lain yang mengangkat permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana Ilmu Politik.

B. Latar Belakang Masalah

Uni Soviet merupakan sebuah negara *super power* yang pernah berjaya selama puluhan tahun. Terbentuknya Uni Soviet tidak terlepas dari Revolusi Bolshevik yang terjadi pada tahun 1917, revolusi ini berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II dan menjadi awal berdirinya rezim sosialis Uni Soviet.

Uni Soviet terkenal dengan sistem pemerintahannya yang totaliter sejak masa kepemimpinan Vladimir Ilych Lenin sebagai presiden pertama Uni Soviet. Sistem pemerintahan yang ditetapkan menekankan komando yang tersentralistik dari atas. Sentralitas pemerintahan yang memang dibutuhkan bagi jalannya sistem politik diktator proletariat, yang mengutamakan pola "*top down*" dalam pengambilan keputusan yang kemudian dipaksakan kepada masyarakat. Pemusatan kekuasaan politik dan kekuatan politik hanya berada di tangan beberapa orang yang konservatif dan stagnan, serta mengandalkan pada teror.

Mekanisme sistem politik tersebut terus berlangsung di Uni Soviet dari sejak awal kekuasaan sampai kemudian ketika Uni Soviet jatuh ke tangan Mikhail Gorbachev, yang diangkat menjadi Sekretaris Jendral Partai komunis

.....

11 Maret 1985. Gorbachev ingin mengadakan perubahan di segala bidang atau reformasi yang lebih radikal daripada reformasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Uni Soviet sebelumnya.

Gagasan pembaharuan yang diusung oleh Mikhail Gorbachev tersebut meliputi tiga hal pokok, yakni:

1. *Perestroika* (restrukturisasi), dimaksudkan untuk segala bidang terutama ekonomi.
2. *Glasnot* (keterbukaan), suatu kondisi yang memungkinkan terjadi dialog dan pengungkapan kritik.
3. *Demokratizatsiia* (demokratisasi), untuk membuka hak monopoli atas kebijakan publik.

Konsep pembaharuan Gorbachev diatas merupakan embrio dari pecahnya Uni Soviet dan sekaligus kunci pintu perkembangan demokrasi di 15 negara bagiannya. Peluncuran konsep pembaharuan tersebut bukanlah tanpa alasan yang jelas, tetapi Gorbachev melihat keadaan Uni Soviet yang mengalami stagnasi ekonomi serta perkembangannya yang menghadapi jalan buntu. Di bidang sosial, budaya dan politik, keadaan masyarakat berjalan tidak menentu. Partai Komunis sebagai organ pendamping dan pengarah kebudayaan semakin tidak bisa memainkan perannya.

Namun, kebijakan pembaharuan Mikhail Gorbachev ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Beberapa pihak dalam PKUS sendiri banyak

yang jelas-jelas menentang, misalnya Anshket, M. G. 1

Gorbachev tidak bisa melaksanakan pemikiran tersebut secara optimal atau dengan kata lain mereka meragukan kemampuannya.

Kebijakan Gorbachev yang mengakibatkan pertentangan dalam tubuh PKUS telah mengakibatkan situasi politik dan ekonomi Uni Soviet semakin memburuk. "Pada tahun 1990 Uni Soviet berada dalam situasi yang sangat genting, timbul kerusuhan, defisit anggaran dalam jumlah yang sangat besar, jumlah pengangguran meningkat, pemogokan para pekerja, pendapatan menurun dan situasi konsumen menjadi lebih buruk daripada tahun 1985."²

Keadaan diatas semakin mengiringi berakhirnya masa kejayaan Uni Soviet. Hal ini dikarenakan tidak adanya lagi penyatuan pemikiran dari tingkat bawah dan atas, sehingga keselarasan yang kuat antara rakyat dan para elit tidak bisa dipertahankan lagi dan ini sangat berakibat fatal karena dengan tidak adanya keselarasan pemikiran tersebut merupakan awal dari disintegrasi yang dilakukan oleh negara-negara bagian Uni Soviet. Selain itu, hal ini juga dikarenakan Demokratisasi yang diusung Gorbachev yang telah memberikan inspirasi bagi negara-negara tersebut untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Runtuhnya Tembok Berlin merupakan pertanda simbolik dari pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara kesatuan.

Setelah lepas dari Uni Soviet dan mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka, Rusia sebagai negara yang secara kebudayaan merupakan representatif besar dari Uni Soviet bersama Belarusia dan Ukraina mendirikan CIS (*Commonwealth of Independent States*) pada tanggal 8 Desember 1991.

² Catherine J. Dunke, *Russian Politics and Society: An Introduction*, Pearson Education, Inc. 1991, p. 100.

Dua minggu setelah pendirian CIS, 8 negara pecahan Uni Soviet lainnya kemudian ikut bergabung menjadi anggota. Negara-negara tersebut yakni Armenia, Ajerbaizan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Georgia baru ikut bergabung pada tahun 1993. Sementara Lithuania, Latvia dan Estonia yang telah merdeka sejak awal tahun 1991 menolak bergabung dalam CIS.

CIS merupakan organisasi persemakmuran negara-negara pecahan Uni Soviet. Kekuasaan pusat dalam CIS menggunakan model seperti yang dipakai oleh Uni Eropa yang memiliki kekuasaan terbatas. Diantaranya kewenangan dalam membangun atmosfer perekonomian secara umum, mengkoordinir kebijakan luar negeri dan imigrasi, perlindungan terhadap lingkungan serta pemberantasan kejahatan.

Perubahan sistem politik pun terjadi, negara-negara tersebut akhirnya terseret masuk ke dalam kerangka demokratisasi sebagai suatu pilihan dan mulai mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politiknya. Seperti halnya negara demokratis, negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut mulai membenahi negerinya dengan membangun konsep demokrasi, diantaranya melalui penyelenggaraan Pemilu, perubahan sistem partai politik dari sistem partai tunggal menjadi sistem multi partai, pembagian dalam hal pelaksanaan kekuasaan negara, dan lain-lain.

Namun, berada dibawah rezim otoriter Uni Soviet selama kurang lebih 70 tahun, telah mengakibatkan budaya otoriterisme tersebut menjadi warisan yang didapati oleh hampir seluruh negara di kawasan tersebut. Hal ini

Soviet. Hal ini mengingat suatu kecenderungan bahwa seseorang yang berada dalam rezim otoriter dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengakibatkan seseorang itu menjadi otoriter juga. Demokratisasi yang menjadi awal dari terbentuknya negara-negara tersebut malah menjadi beku, karena setelah lepas dari Uni Soviet negara tersebut kembali dipimpin oleh penguasa yang otoriter. Hal ini tentu saja menghambat proses demokrasi di negara-negara tersebut, karena para pemimpin tersebut tentu saja tidak ingin mengakhiri kekuasaan mereka, para diktator tersebut cenderung ingin melanggengkan kekuasaan mereka, bahkan kalau bisa sampai mereka meninggal, seperti yang terjadi pada penguasa Spanyol Franco Fransisco (1939-1975).

Salah satu negara pecahan Uni Soviet yang berada dalam rezim otoriter adalah Uzbekistan. Uzbekistan yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1991, mengalami nasib yang hampir sama dengan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Sejak merdeka Uzbekistan berada di bawah pemimpin otoriter Islam Karimov, karena sejak tanggal 24 Maret 1990 Karimov telah menjadi presiden Republik Sosialis Uzbek Soviet. Setelah merdeka, pada tanggal 29 Desember 1991 Karimov berhasil memenangkan hak pilih dengan 86% suara. Pada tahun 1995 Karimov memperpanjang masa pemerintahannya sampai tahun 2000, dan pada tanggal 9 Januari 2000 Karimov telah terpilih kembali sebagai presiden.

Sejak kepemimpinannya pada tahun 1990, Karimov telah banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Uzbekistan. Puluhan ribu Muslim dan Muslimah ditahan tanpa proses peradilan. Mereka yang dipenjara mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Mereka menjadi sasaran pemukulan, kurungan bawah tanah, suntikan dengan darah terinfeksi HIV, dan lain sebagainya karena mereka tetap shalat dan menolak mengajukan permohonan maaf kepada Karimov.

Sementara itu, sejak tahun 1997 hampir semua aktivitas keagamaan terutama yang bernama Islam, selalu diawasi di negeri itu. Semua kelompok yang dinilai melakukan oposisi mendapat pengawasan yang sangat ketat. Bahkan, pemerintah tidak segan-segan menculik dan menghukum mereka tanpa melalui proses peradilan. Secara khusus, Hizbut Tahrir telah menjadi target utama Presiden Karimov hanya karena seruan politiknya untuk menegakkan Khilafah Islamiyah secara damai di Asia Tengah dan mempersatukan kaum Muslim di seluruh dunia. Hizbut Tahrir juga sangat dibenci oleh rezim Karimov karena kritiknya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang gagal, korup dan tiranik.

Sejak kampanye “perang melawan terorisme” yang dipimpin oleh AS, serangan dan tekanan terhadap Muslim Uzbekistan semakin meningkat. Dukungan AS terhadap Uzbekistan telah secara efektif digunakan sebagai alat pembenaran oleh tiran Uzbekistan itu untuk melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok penentanginya. “Karena partisipasinya dalam “perang melawan terorisme” oleh AS itu, Uzbekistan telah menerima bantuan dari

dari AS sebesar 55 juta dollar dengan jaminan Bank Ekspor Impor AS. Tiran yang kejam ini juga dijanjikan utang luar negeri 160 juta dollar, tiga kali lipat jumlah utang sebelumnya, sebagaimana yang dilansir sebuah artikel di *Washington Post* (13/3/2002).³

Kebijakan-kebijakan Karimov memang sangat jauh dari nilai-nilai demokratis dan lebih banyak melanggar hak-hak asasi manusia. Rakyat Uzbekistan sebagai sebuah individu tidak memiliki kebebasan seperti halnya yang dimiliki rakyat dalam sebuah negara demokratis. Mereka terkurung dalam sebuah tiran yang sangat kejam, yang sama sekali tidak menghormati hak-hak asasi manusia.

Seiring dengan timbulnya perubahan politik besar-besaran di kawasan Asia Tengah, angin demokrasi rupanya ikut berhembus ke Uzbekistan. Setelah berada di bawah rezim tiran Karimov selama kurang lebih 15 tahun, lambat laun rakyat bangkit dan mulai melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang otoriter.

Kemuakan rakyat Uzbekistan mencapai puncaknya pada tanggal 13 Mei 2005, ketika rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Andijan yang kemudian dikenang sebagai Tragedi Andijan. Peristiwa tersebut diawali oleh unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga Uzbekistan di kota Andijan yang menuntut pemerintah agar membebaskan 23 pengusaha Muslim yang dituduh terlibat dalam kelompok yang bernama *Akromiya*. "*Akromiya* merupakan sebuah jaringan organisasi yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di

³"Tragedi Andijan: Kebiadaban Karimov, Dan Persekongkolan AS-Rusia", on line, <http://www.al-islam.or.id>, diakses tanggal 6 Oktober 2005.

seluruh negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah.”⁴ Pada saat yang bersamaan, sekelompok orang bersenjata menyerang kantor polisi, markas tentara, dan menyerbu penjara untuk membebaskan sekitar 2000 narapidana.

Namun, upaya itu gagal karena tentara Uzbekistan langsung melancarkan serangkaian tembakan ke arah kerumunan massa yang dijadikan tameng oleh kelompok bersenjata itu. “Berapa jumlah korban pembantaian itu belum diketahui secara pasti. Pemerintah Uzbekistan menyebut angka 169, namun kelompok oposisi yakin korban setidaknya 746 orang.”⁵

Dilain pihak, Kepala Federasi Internasional Helsinki urusan HAM menyatakan bahwa korban tewas dalam kerusuhan itu mencapai lebih dari seribu orang. Oleh karena itu, Komisi Eropa dan Komisi Tinggi PBB urusan HAM dan sejumlah lembaga internasional lainnya menuntut adanya penyelidikan secara resmi dan independen oleh masyarakat internasional.⁶

Peristiwa ini disinyalir sebagai peristiwa pembantaian terhadap demonstran terbesar di Asia setelah Tragedi Tiananmen di China. Untuk menutupi dosa-dosanya itu, Pemerintah Uzbekistan menutup semua akses keluar-masuk wilayah Uzbekistan dan akses tayangan siaran media-media asing. Dengan membungkam media, sekali lagi Karimov telah menunjukkan ketidakdemokratisannya.

Karimov berupaya untuk mengalihkan perhatian dari aksi pembantaian sadis yang dilakukannya terhadap ratusan penduduk sipil yang berunjuk rasa di Andijan, termasuk kaum wanita dan anak-anak yang

⁴ “Kerusuhan Berdarah Melanda Uzbekistan”, on line, www.kompas.com/kompas-cetak/0505/14/ln/1749315.htm, diakses tanggal 6 Oktober 2005

⁵ Luki Aulia dan Budi Suwarna, “Perlawanan Rakyat Uzbek Yang Patah”, *Kompas*, 22 Mei 2005

⁶ “Tekanan Internasional Terhadap Tashkent Terkait Tragedi Andijan”, on line,

www.inh.org/press/andijan/melara-DANOC/andijan_korban/050514/andijan_korban.htm

tidak bersenjata dengan menuduh Hizbut Tahrir sebagai dalang dibalik peristiwa tersebut.

Padahal, pembunuhan ini merupakan atas perintahnya melalui Menteri Dalam Negeri-nya yang brutal, yaitu Almatov dan para petugas keamanan. Pembantaian di Andijan ini merupakan babak paling akhir dari penyiksaan Karimov yang brutal, intimidasi, dan pembunuhan terhadap semua pihak yang berani berbicara lantang atas praktik korupsi, tirani, dan ketidakadilan yang dilakukannya.⁷

Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2005 tersebut merupakan salah satu upaya demokratisasi yang dilakukan rakyat Uzbekistan. Mereka ingin mengakhiri rezim Karimov dan menggantinya dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun sayangnya upaya itu gagal, bahkan sedikitnya 746 nyawa rakyat yang tidak berdosa harus berakhir dengan peluru-peluru tentara Karimov.

Kegagalan demokratisasi yang terjadi di Uzbekistan meninggalkan sebuah tanda tanya besar. Hal ini mengingatkan tiga revolusi di negara-negara pecahan uni Soviet sebelumnya berhasil menggulingkan rezim otoriter dan menggantinya dengan penguasa yang lebih demokratis.

Revolusi Mawar yang terjadi di Georgia telah berhasil menumbangkan Presiden pro-Russia, Eduard Shevardnaze yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet. Revolusi *Orange* di Ukraina telah berhasil membatalkan kemenangan Presiden Victor Yanucovich, dan tampillah tokoh oposisi dukungan Amerika, Victor Yuschenko, sebagai presiden terpilih. Dan yang terakhir Revolusi Tulip di Kirgistan berhasil menjatuhkan Presiden Askar Akayev.⁸

Kesamaan latar belakang permasalahan yang mendorong gelombang demokrasi seperti kemiskinan dan berada di bawah rezim otoriter dalam

⁷ Muhammad Ismail Yusanto, "Pernyataan Pers: Hizbut Tahrir Menantang Karimov Mengakhiri

jangka waktu yang lama, tidak serta merta memberikan hasil akhir yang sama. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam tiga revolusi sebelumnya sangat berperan terhadap suksesnya revolusi dan demokratisasi, namun hal ini tidak berlaku bagi Uzbekistan. Keberadaan Amerika Serikat di Uzbekistan tidak memberikan dampak positif terhadap demokratisasi yang dicoba dibangun di negeri ini, hingga akhirnya demokratisasi tersebut harus menemui kegagalan dan Islam Karimov masih berdiri kokoh memegang puncak kekuasaan di Uzbekistan.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka disusun suatu rumusan permasalahan sebagai berikut: “Mengapa demokratisasi di Uzbekistan mengalami kegagalan?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan demokratisasi di Uzbekistan
2. Untuk menambah wawasan mengenai demokrasi dan demokratisasi, terutama yang terjadi di negara-negara yang sebelumnya berideologi komunis seperti Uzbekistan di”

3. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk membantu menjawab rumusan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan Teori Demokrasi sebagai kerangka dasar pemikiran dalam menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan demokratisasi di Uzbekistan.

Teori Demokrasi

Samuel P. Huntington menyebutkan bahwa terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui 4 proses, yaitu:

1. *Transformasi* atau *Reforma*, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi.
2. *Replacemnet* atau *Ruptura*, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi.
3. *Transplacement* atau *Ruptforma*, dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi.
4. *Intervensi*, yang jarang terjadi yaitu dimana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.⁹

⁹ Samuel P. Huntington, *Celebration Democracy: The End of the Cold War*, 1990, p. 100

Berdasarkan teori diatas, upaya demokratisasi yang dicoba dilakukan di Uzbekistan menggunakan model *Replacement* atau *Ruptura*, yakni transisi demokrasi yang dipelopori oleh kelompok oposisi. Dalam proses *Replacement*, kelompok pembaharu masih sangat lemah atau tidak ada dalam rezim itu. Unsur-unsur yang dominan dalam pemerintahan adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim, kelompok ini biasanya sangat kuat dan solid. Di Uzbekistan Kelompok konservatif tersebut tidak lain adalah Presiden Islam Karimov yang mendapat dukungan kabinet serta pihak militer. Kesolidan kelompok tersebut nampak pada peristiwa Andijan yang terjadi pada tanggal 13 mei 2005 lalu.

Akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah atau kelompok konservatif semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan. Proses ini meliputi tiga fase yang berbeda, yakni; perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.

Sementara itu, kelompok oposisi yang dimaksud sebagai pelopor demokratisasi di Uzbekistan adalah rakyat yang ingin melakukan perubahan dalam sistem politik Uzbekistan, termasuk mengganti pemerintahan dengan yang lebih demokratis. Hal ini mengingat oposisi dalam bentuk institusi tidak dapat berkembang di Uzbekistan, karena pemerintah melakukan penekanan dan pengawasan yang sangat ketat terhadap segala bentuk aktivitas kelompok oposisi. "Pada tahun 1992 Karimov melarang kegiatan Partai oposisi Erk dan Birlik seluruh bangsa Uzbekistan ditahan dengan tindakan militer 1

kegiatan anti pemerintah.”¹⁰ Hal ini mengakibatkan kelompok oposisi di Uzbekistan sangat lemah, karena dengan adanya pengawasan dari pemerintah maka kelompok tersebut sulit untuk melakukan konsolidasi.

Fase *Replacement* yang terjadi di Uzbekistan baru sampai pada fase perjuangan untuk menumbangkan rezim. Namun, karena kelompok oposisi yang masih lemah, fase tersebut gagal dilewati. Padahal transisi demokrasi dengan model *Replacement* mensyaratkan kelompok oposisi harus kuat agar dapat mengikis kekuasaan pemerintah dan menggeser perimbangan kekuatan ke arah yang menguntungkannya sehingga rezim otoriter dapat digulingkan dan demokratisasi bisa terwujud.

Fase *Replacement* pada umumnya terjadi di negara-negara otoriter dengan sistem diktator perorangan. “Ciri khas kediktatoran perorangan diantaranya sang pemimpin merupakan sumber wewenang, dan kekuasaan bergantung pada akses kepada seorang pemimpin, kedekatan dengannya, ketergantungan padanya dan dukungan darinya.”¹¹ Selain itu, ciri khas lain dari sistem diktator perorangan adalah menindas persaingan dan aspirasi.

Uzbekistan merupakan salah satu rezim otoriter yang menganut sistem diktator perorangan. Islam Karimov sebagai Presiden Uzbekistan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar, dan dengan kekuasaan dan kewenangannya itu Karimov tidak segan-segan untuk membunuh dan mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Di samping itu, Karimov juga seorang Presiden yang tidak memberikan kebebasan terhadap media massa.

¹⁰ “The ‘New’ ‘Old’...”

Memperjuangkan “keterbukaan” politik seperti itu jelas bukan suatu hal yang mudah. Proses itu pasti melibatkan suatu pertentangan kepentingan antara pemerintah dengan yang diperintah. Semakin besar perbedaan kepentingan antara pemerintah dan kelompok non-pemerintah, maka semakin besar kemungkinan bahwa masing-masing akan menolak memberi peluang kepada pihak lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan tidak jarang harus dibayar dengan tindakan kekerasan dan peristiwa bedarah, seperti halnya yang terjadi di Uzbekistan. Perbedaan kepentingan antara rezim Karimov dengan rakyat Uzbekistan telah mengakibatkan terjadinya tragedi Andijan yang harus dibayar dengan terbunuhnya 746 warga sipil.

Samuel P. Huntington menyebutkan adanya beberapa faktor yang menghambat demokrasi terwujud di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori besar.

Yang pertama adalah politik, yakni tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada kebanyakan negara yang masih otoriter di tahun 1990-an dan para pemimpin yang menciptakan rezim otoriter atau yang tetap berkuasa untuk waktu lama dalam rezim-rezim semacam itu, biasanya menjadi kaum konservatif yang gigih menentang demokratisasi. Kedua adalah faktor budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran-penyebaran demokrasi di dalam masyarakat. Ketiga adalah faktor ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi di suatu negara karena demokrasi sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di suatu negara¹²

Dari ketiga faktor penghambat demokrasi yang dipaparkan Huntington diatas walaupun tidak terlalu signifikan namun semua faktor tersebut ada dan

ikut andil dalam mengakibatkan kegagalan demokratisasi di Uzbekistan. Namun, tanpa mengabaikan faktor-faktor yang lain, dalam karya tulis ini penulis hanya memfokuskan pada faktor politik, karena faktor politik merupakan faktor utama dan paling dominan yang mengakibatkan kegagalan demokratisasi di Uzbekistan.

Pada tahun 1990 Uzbekistan masih berada di bawah bendera Uni Soviet. Walaupun pada tahun tersebut Gorbachev sedang mendengungkan konsep pembaharuannya, termasuk konsep demokratisasi, namun pada saat itu, Uzbekistan telah berada di bawah pimpinan Islam Karimov yang sangat otoriter. Jadi pada tahun tersebut Uzbekistan masih berada dalam bayang-bayang rezim otoriter yang terus berupaya melanggengkan kekuasaannya.

Berada di bawah rezim otoriter Uni Soviet selama 70 tahun, telah mengakibatkan otoriterisme tersebut menjadi suatu sistem yang turun temurun dan membudaya di kalangan para elit, walaupun negara tersebut telah terpisah dan menjadi negara yang merdeka. Pemerintahan yang otoriter akan selalu menjadi penghambat bagi terlaksananya demokratisasi. Karena dengan adanya demokratisasi berarti akan mengurangi kekuasaan dan kontrol pemerintah terhadap rakyat, sehingga para penguasa tersebut akan berupaya mati-matian mempertahankan kekuasaan mereka dan menghambat terjadinya demokratisasi.

Sementara itu, Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Yakni, “sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga negara.”¹³

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan dinetralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya Pemilu yang jujur dan adil.
5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.
6. Konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.¹⁴

Uzbekistan tidak dapat dikategorikan sebagai negara demokratis karena tidak memenuhi sebagian besar prasyarat negara demokratis.

Walaupun mengenal sistem pemilihan umum, tapi disinyalir diwarnai dengan

¹³ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven, Conn., 1955, hal. 11.

berbagai bentuk kecurangan. Pemerintah Uzbekistan juga “mengawasi” aktifitas organisasi terutama yang mengatasnamakan Islam, sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjadi anggota suatu organisasi, karena mereka diliputi perasaan khawatir organisasinya termasuk organisasi yang “diawasi” pemerintah.

Puncak dari kegagalan demokratisasi di Uzbekistan adalah ketika ribuan rakyat yang berunjuk rasa sebagai bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat, pemerintah Uzbekistan malah membalasnya dengan hujan peluru yang mengakibatkan ratusan jiwa warga sipil melayang di tangan aparat pemerintah. Sikap pemerintah tersebut sangat bertentangan dengan ciri-ciri negara demokratis. Sebuah negara yang menganut faham demokrasi tidak akan menggunakan tindakan kekerasan untuk menghadapi demonstrasi seperti itu, karena demonstrasi merupakan bentuk kebebasan menyampaikan pendapat.

Selain itu, sebuah negara yang demokratis adalah negara yang menghargai hak-hak asasi manusia. Pembantaian massal terhadap warga sipil yang terjadi pada tragedi Andijan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Uzbekistan, disamping tindakan-tindakan lainnya seperti pembunuhan terhadap lawan-lawan politik, interogasi yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap aktivis gerakan islam, dan lain-lain.

Bila melihat teori diatas, secara keseluruhan Uzbekistan tidak mendapat integrasi dari negara yang anti demokrasi. Karena melalui Dunia

sebagai *representative* Uni Soviet memiliki kedekatan dengan Uzbekistan dan belum bisa dikatakan sebagai negara demokratis sepenuhnya, namun negara ini juga tengah mengalami transisi demokrasi.

Menurut Huntington, lingkungan internasional dan aktor-aktor luar negeri telah memainkan peran penting dalam penciptaan demokrasi. Yang dimaksud dengan "lingkungan eksternal" disini adalah pemerintah asing dan aktor-aktor lain yang juga demokratis, mendukung eksistensi rezim demokratis di negara lain, dan memiliki hubungan dekat dengan negara demokratis.¹⁵

Apalagi ketika pengaruh tersebut terhadap negara-negara dunia ketiga, karena kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan yang terjadi di negara mereka (negara dunia ketiga) membuat negara tersebut mencari nilai-nilai yang lebih baik yang akan membuat atau menciptakan kondisi yang akan memberikan kesejahteraan atau kemakmuran untuk diri mereka sendiri

Keberadaan dan kedekatan Amerika Serikat dengan Uzbekistan seharusnya menjadi salah satu faktor pendorong demokratisasi di Uzbekistan. Dalam kasus revolusi di Georgia, Kirgistan dan Ukraina, Amerika Serikat memiliki peran yang cukup signifikan dalam mensukseskan revolusi tersebut. Sebagai sebuah negara demokratis terbesar, seharusnya Amerika Serikat dapat memberikan pengaruhnya untuk mendorong demokratisasi di negara tersebut. Pinjaman utang luar negeri untuk Uzbekistan seharusnya bisa dijadikan alat untuk menekan pemerintah agar melakukan demokratisasi.

Namun, tentu saja hal ini akan menjadi berbalik ketika AS memiliki kepentingan lain terhadap rezim otoriter tersebut. Karena seperti kita ketahui, AS seringkali menggunakan politik standar ganda untuk mendapatkan dan

¹⁵ Samuel P. Huntington, *op.cit.*, hal..350

melindungi kepentingannya. Salah satu kepentingan Amerika Serikat di Uzbekistan adalah untuk mempermudah melakukan operasi di Afghanistan dalam mencari sisa-sisa pemerintahan Taliban.

Untuk mempermudah operasinya, Uzbekistan memberikan bantuan militer dan fasilitas pangkalan udara bagi Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan bantuan pinjaman luar negeri bagi Uzbekistan dalam jumlah besar. Jadi, di satu sisi Amerika Serikat mengkampanyekan demokrasi bagi negara-negara yang masih otoriter, tapi di sisi yang lain Amerika Serikat malah mendukung rezim-rezim otoriter yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap kepentingannya.

F. Hipotesa

Kegagalan demokratisasi di Uzbekistan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor internal: Rezim Otoriter Islam Karimov sangat kuat dan solid diantaranya mendapat dukungan kabinet serta pihak militer, sementara kelompok oposisi sangat lemah.
2. Faktor eksternal: Amerika Serikat yang selalu menggunakan standar ganda, yakni di satu sisi Amerika mengkampanyekan demokrasi, tapi di sisi lain Amerika memberikan dukungan kepada rezim otoriter Karimov karena rezim tersebut memberikan dukungan terhadap kepentingan

G. Metodologi Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam hal ini mengenai kegagalan demokratisasi di Uzbekistan.

Data-data yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal di Internet dan CD-Rom, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah sejak terpilihnya Islam Karimov sebagai Presiden Uzbekistan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka secara keseluruhan penulis membagi karya tulis ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penulisan dan pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Sejarah Politik Uzbekistan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah politik Uzbekistan mulai dari tergabungnya dalam Uni Soviet sampai menjadi negara merdeka paska runtuhnya Uni Soviet. Bab ini juga akan membahas mengenai sistem politik Uzbekistan paska kemerdekaannya di bawah pimpinan Presiden Islam Karimov.

BAB III. Faktor Internal Kegagalan Demokratisasi di Uzbekistan

Bab ini berisi analisis tentang kekuatan rezim otoriter Islam Karimov dan lemahnya kelompok oposisi di Uzbekistan serta tuntutan mereka terhadap demokratisasi sistem politik.

BAB IV. Faktor Eksternal Kegagalan Demokratisasi di Uzbekistan

Bab ini berisi tentang faktor luar yang ikut berperan dalam terjadinya kegagalan demokratisasi di Uzbekistan. Diantaranya politik standar ganda

Amerika Serikat terhadap permasalahan yang terjadi di Uzbekistan dan kepentingan Rusia terhadap Rezim Karimov.

BAB V. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, yang berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya.